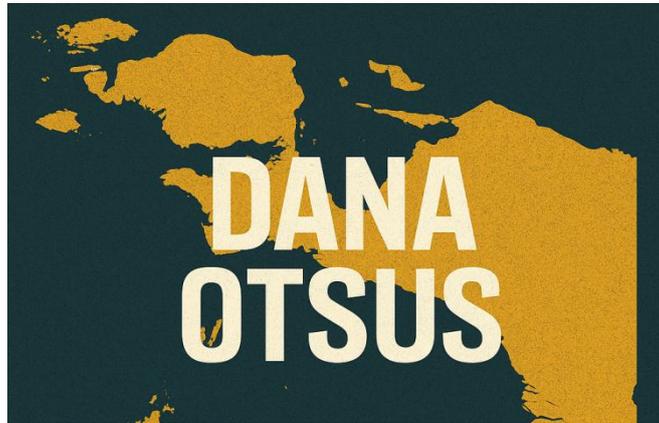


## PEMROV PAPUA BARAT PASTIKAN PENYALURAN DANA OTSUS 2026 TEPAT WAKTU



*sumber gambar: chatgpt.com*

Pemerintah Provinsi Papua Barat menegaskan bahwa penyaluran dana otonomi khusus (otsus) untuk tahun 2026 akan dilakukan tepat waktu, sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Saat ini, pemerintah daerah tengah menyusun dokumen Rencana Anggaran Program (RAP) tahun 2026 sebagai salah satu persyaratan pencairan dana tersebut. "Ini agar dana otsus 2026 dapat disalurkan tepat waktu," ujar Pelaksana Tugas Kepala Bappeda Papua Barat, Deassy D. Tetelepta di Manokwari, Minggu. Ia menjelaskan bahwa RAP pemanfaatan dana otsus akan diintegrasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Proses tersebut dimulai dengan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) otsus di tingkat kabupaten dan provinsi pada Maret hingga April, dilanjutkan dengan penyusunan RAP pada bulan Mei hingga Juni, serta penyusunan RKPD dan KUA-PPAS antara Juni hingga September. "RAP ini merupakan bagian dari RKPD dan sekarang sistem pemerintahan harus berbasis digital agar tidak terjadi keterlambatan lagi," jelasnya. Deassy mengakui bahwa keterlambatan penyaluran dana otsus tahun 2025 menjadi bahan evaluasi penting untuk memperkuat koordinasi antarorganisasi perangkat daerah yang menangani dana tersebut.

Permasalahan penyaluran tahun sebelumnya menjadi pelajaran agar kejadian serupa tidak terulang di tahun-tahun berikutnya. "RAP otsus tahun 2025 untuk tingkat provinsi sudah rampung. Sementara kabupaten juga telah melaksanakan musrenbang," tambahnya. Sementara itu, Kepala BPKAD Papua Barat, Agus Nurodi, menyampaikan bahwa pemerintah provinsi telah mengunggah dokumen RAP otsus 2025 ke dalam aplikasi OM SPAN TKD. Setelah diunggah, dokumen tersebut akan diverifikasi oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan. Jika dinyatakan lengkap, maka rekomendasi penyaluran akan diterbitkan. "Kami telah

mengunggah dokumen tersebut dan saat ini menunggu hasil verifikasi dari DJPK,” ujarnya. Sebagai informasi, total pagu dana otsus tahun 2025 yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada delapan pemerintah daerah di Papua Barat berjumlah Rp1,562 triliun. Rinciannya adalah: Pemprov Papua Barat sebesar Rp687,01 miliar, Pemkab Manokwari Rp133,79 miliar, Pemkab Fakfak Rp133,27 miliar, dan Pemkab Kaimana Rp70,43 miliar. Sementara itu, Pemkab Teluk Bintuni menerima Rp156,53 miliar, Pemkab Teluk Wondama Rp141,07 miliar, Pemkab Pegunungan Arfak Rp103,76 miliar, dan Pemkab Manokwari Selatan sebesar Rp136,22 miliar.

**Sumber Berita:**

antaranews.com, “**Pemprov Papua Barat Pastikan Penyaluran Dana Otsus 2026 Tepat Waktu**”, tanggal 15 Juni 2025

**Catatan:**

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, pada Pasal 1 huruf b, menyebutkan bahwa Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua.